

**SKRIPSI**

**PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA OLEH PARTAI POLITIK  
(STUDI KASUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
CABANG KOTA MATARAM)**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S-1)  
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun Oleh:

Aisyah Rosiana Dewi  
2019B1D008

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA OLEH PARTAI POLITIK  
(STUDI KASUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
CABANG KOTA MATARAM)**

oleh ;

**AISYAH ROSIANA DEWI**  
**NIM 2019B1D008**

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Di Periksa dan Disetujui untuk Diuji Pada Ujian Skripsi  
Mataram, 18 Oktober 2023

**Menyetujui  
Pembimbing**

**Pembimbing I**



Drs. H. Darmansyah, M.Si  
NIDN.0008075914

**Pembimbing II**



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP  
NIDN. 0827118801

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP  
NIDN.0827118801

LEMBAR PENGESAHAN

PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA OLEH PARTAI POLITIK  
(STUDI KASUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
CABANG KOTA MATARAM)

Oleh:

AISYAH ROSIANA DEWI  
NIM.2019B1D008

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 18 Oktober 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

Drs. H. Darmansyah, M.Si  
IIDN.0008075914

  
Ketua

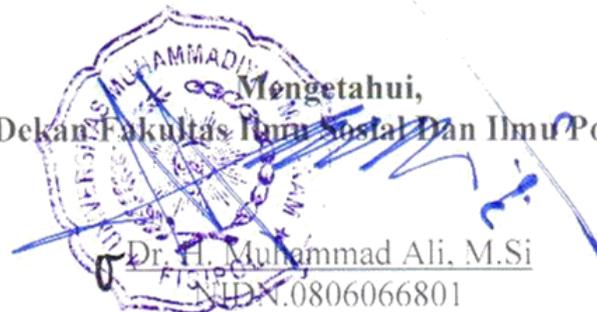
Mudhi Lestanata, S.IP., M.IP  
IIDN.0827118801

  
Anggota I

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP  
IIDN.0816057902

  
Anggota II

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

  
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
IIDN.0806066801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di universitas Muhammadiyah mataram maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

**Mataram, 10 November 2023**

**Yang membuat pernyataan,**



**Aisyah Rosiana Dewai**

**NIM: 2019B1D008**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AISYAH ROSIANA DEWI  
NIM : 201610008  
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA, 13 Mei 2001  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 0881037128566  
Email : Aisyah.Rosiana@ummat.ac.id

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PEINDOIKAN PEMILIH PEMULA OLEH PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PARTAI  
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN CABANG MATARAM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Selasa, 17 November 2023  
Penulis

  
AISYAH ROSIANA D.  
NIM. 201610008

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos.,M.A. why  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:upt.perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AISYAH ROSIANA DEWI  
NIM : 201610008  
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA, 13 Mei 2001  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 0881037128565 / AisyahRosiana@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA OLEH PARTAI POLITIK (~~STUDI~~ STUDI  
KASUS PARTAI DEMOKRASI (INDONESIA PERJUANGAN CABANG MATARAM).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Selasa, 07 November 2023  
Penulis



Aisyah Rosiana D.  
NIM. 201610008

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala kebesaran dan keajaiban yang kutemui dalam separuh perjalanan akademisku, serta sembah sujud atas kemudahan limpahan rahmat berupa kesehatan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan yang terbaik untukku. Teruslah berdoa dan menyayangiku, karena dengan do'a dan segenap cinta kasih kalian, aku bisa bertahan menghadapi kehidupan. Walaupun tidak pernah kuungkapkan lewat bibirku, tapi mataku, tubuhku, jiwaku, dan ragaku menyayangi dan mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, hanya doa dan rasa terima kasih tiada tara yang bisa kuberikan kepadamu wahai pahlawan abadi.
3. Keluarga besar yang selalu memberi nasehat, dan semangat kepadaku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
4. Dosen pembimbing I dan pembimbing II ( Drs. H. Darmansyah, M.Si dan Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP) yang selalu memberikanku semangat dan motivasi, selalu setia menegur dan mendampingiku dalam proses menyelesaikan skripsi.
5. Almamater tercinta, yang sudah menemani selama 4 tahun ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pendidikan Pemilih Pemula oleh Partai Politik (Studi kasus Partai Politik PDI Perjuangan Cabang Kota Mataram)”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abdul Wahab, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.
4. Drs. H. Darmansyah, M.Si., selaku dosen pembimbing I. yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini
5. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP., Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

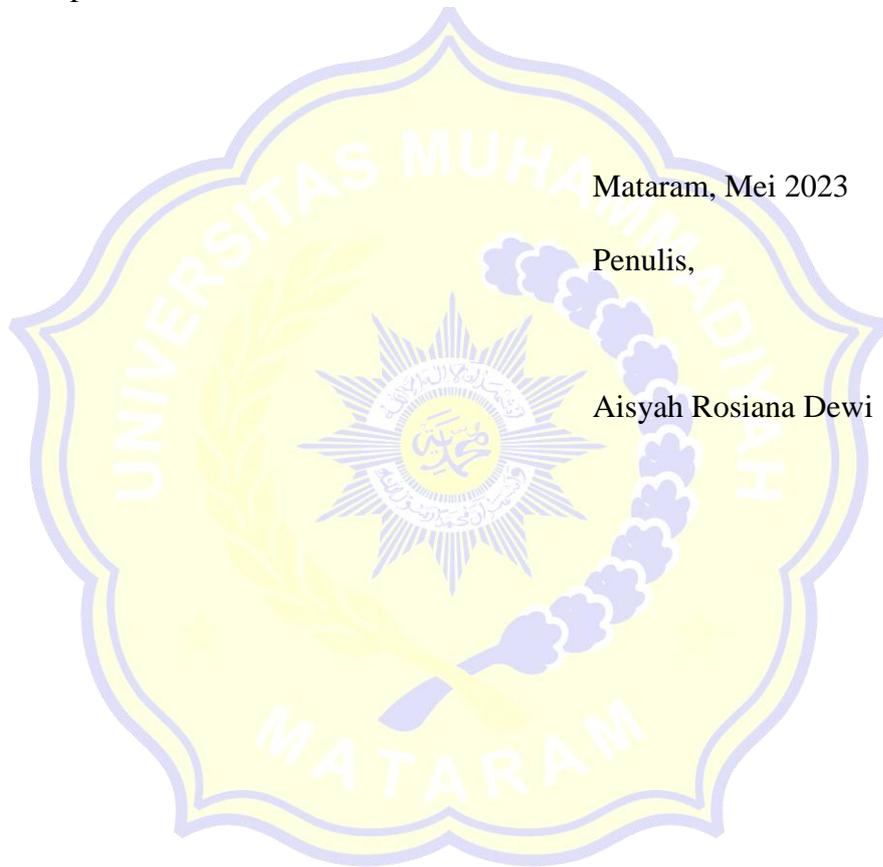
8. Semua pihak disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Mataram, Mei 2023

Penulis,

Aisyah Rosiana Dewi



## ABSTRAK

Pendidikan politik termasuk dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang harus diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memahami dan menghormati sistem dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik juga memfokuskan pada pembentukan karakter dan sikap demokratis serta membantu siswa memahami peran dan fungsi partai politik dalam demokrasi ini sejalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang pendidikan politik di Indonesia. Namun seperti apa bentuk-bentuk pendidikan politik untuk pemilih pemula sebagai persiapan dan pengkaderan yang akan berpartisipasi dalam pemilu serentak yang akan datang menjadi menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti memilih judul “Pendidikan Politik Pemilih Pemula Oleh Partai Politik (Studi Kasus Partai Politik PDI Perjuangan Cabang Mataram)”.

Dalam penelitian ini, peneliti adalah alat utama, dan data dikumpulkan melalui triangulasi teknik. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif/kualitatif, dan hasilnya lebih fokus pada makna generalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua partai politik tersebut telah melaksanakan beberapa program pendidikan politik yang ditujukan untuk pemilih pemula. Program-program ini meliputi pelatihan, seminar, lokakarya, kampanye, dan diskusi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang politik, hak dan kewajiban politik, serta pentingnya partisipasi politik.

**Kata kunci :** *Pendidikan Politik, Pemilih Pemula*

## ABSTRACT

Political education is mandatory for Pancasila and Citizenship Education in Indonesian institutions. Political education aims to cultivate individuals capable of exercising their rights and responsibilities as members of society while also developing an appreciation and comprehension of the democratic system and its values. In addition to fostering democratic attitudes and character, political education teaches students the function and purpose of political parties within a democratic system. It is under Law No. 20/2003, which governs political education in Indonesia and pertains to the National Education System. However, it is intriguing to investigate which types of political education are utilized to prepare and organize novice electors participating in the forthcoming simultaneous elections. "Political Education of Novice Voters by Political Parties (Case Study of the Mataram Branch of the PDI Perjuangan Political Party)" was the title selected by the researcher. In this study, the researcher is the main tool, and data is collected through triangulation of techniques. Data analysis in qualitative research is inductive qualitative, and the results focus more on the meaning of generalization. The results showed that both parties have implemented several political education programs for first-time voters. These programs include training, seminars, workshops, campaigns, and discussions to provide a basic understanding of politics, political rights and obligations, and the importance of political participation.

**Keywords:** Political Education, Novice Voters

**MENGESAHKAN**

**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA**  
**MATARAM**

**KEPALA**  
**UPT P3B**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

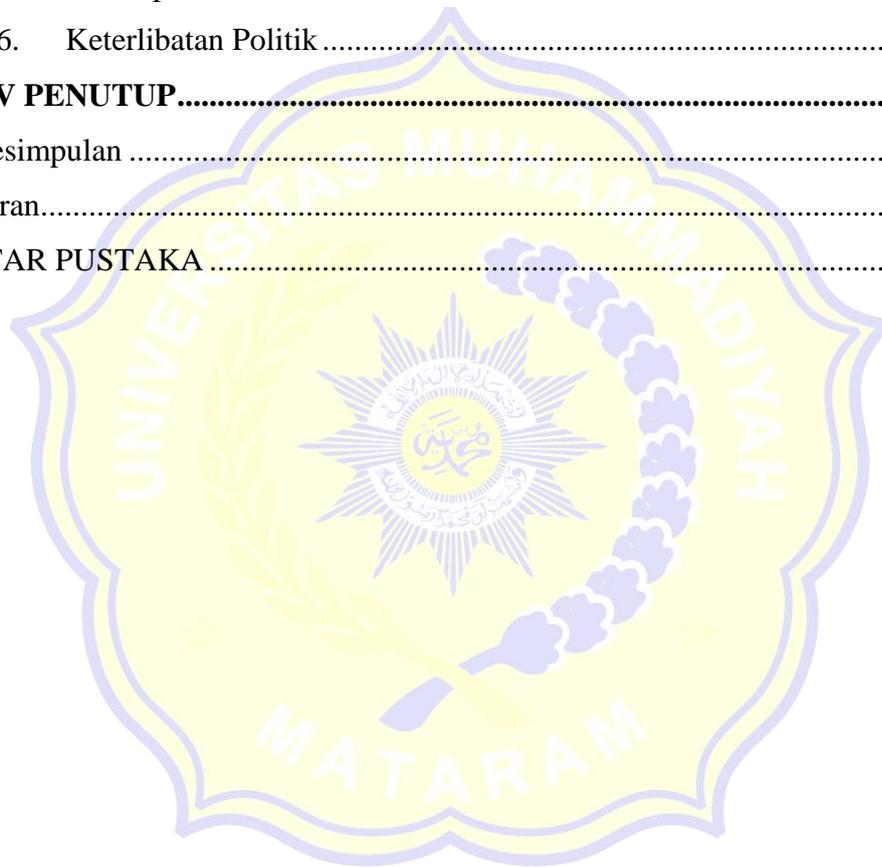


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Secara Teoritis .....	7
1.4.2 Secara Akademik .....	7
1.4.3 Secara Praktis.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Teori .....	18
2.2.1 Definisi Demokrasi .....	18
2.2.2 Definisi Politik.....	20
2.2.3 Pemilihan Umum .....	24
2.2.4 Konsep Pendidikan Politik .....	25

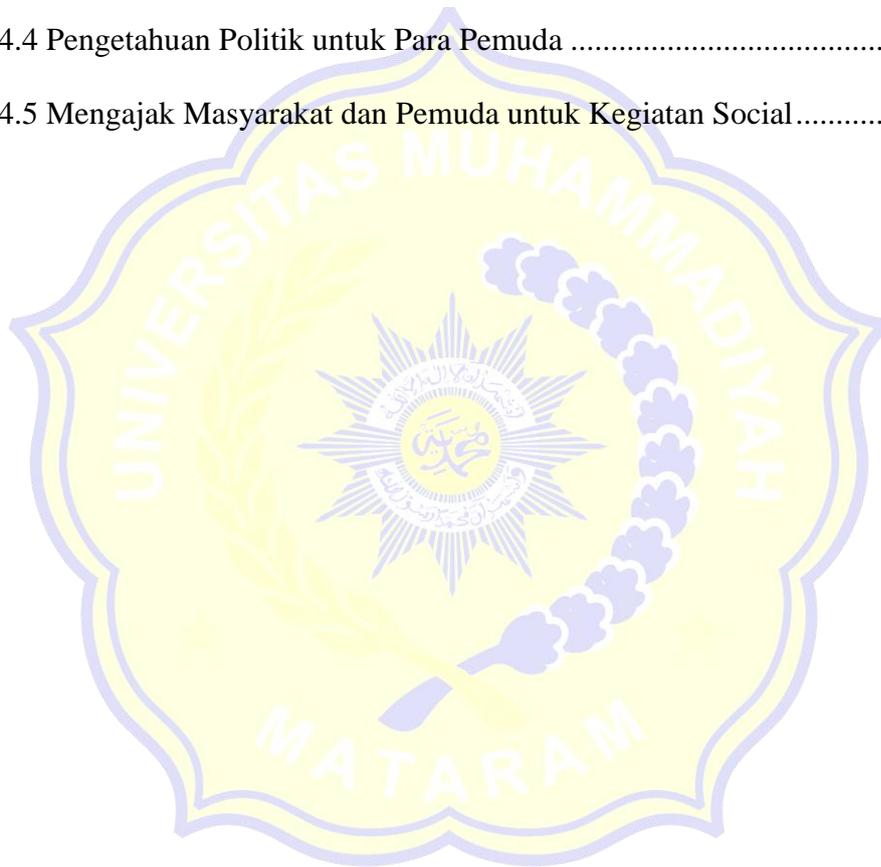
2.2.5 Konsep Pemilih Pemula.....	34
2.2.6 Definisi Partai Politik .....	35
2.2.7 Definisi Sistem Kepartaian .....	36
2.3 Kerangka Berpikir .....	37
2.4 Definisi Konseptual.....	37
2.4.1 Politik.....	38
2.4.2 Pendidikan Politik.....	38
2.4.3 Pemilih Pemula .....	39
2.4.4 Partai Politik .....	39
2.5 Definisi Operasional.....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Metode Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	41
3.2.2 Waktu Penelitian.....	42
3.3 Fokus Penelitian .....	42
3.3.1 Narasumber dan Informan Penelitian .....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.4.1 Wawancara atau Interview.....	43
3.4.2 Observasi .....	44
3.4.3 Dokumentasi .....	44
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	45
3.5.1 Jenis Data.....	45
3.5.2 Sumber Data .....	45
3.6 Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian .....	49
4.1.1 Gambaran umum PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).....	49
4.1.2 Organisasi Sayap .....	49
4.1.3 Susunan pengurus.....	50

4.1.4 Visi PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).....	54
4.1.5 Misi PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) .....	55
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	59
4.2.1. Aspek Pengetahuan Politik .....	60
4.2.2. Aspek Keterampilan Politik.....	63
4.2.3. Aspek Sikap Politik .....	66
4.2.4. Pendidikan Formal.....	69
4.2.5. Kelompok Sosial.....	71
4.2.6. Keterlibatan Politik.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	<b>13</b>
Tabel 2.2 Definisi Operasional .....	40
Tabel 4.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).....	59
Tabel 4.2 Kegiatan PDI Perjuangan Kota Mataram.....	62
Tabel 4.4 Pengetahuan Politik untuk Para Pemuda .....	70
Tabel 4.5 Mengajak Masyarakat dan Pemuda untuk Kegiatan Social.....	72



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	37
Gambar 4.1 Susunan Pengurus .....	53



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi, setiap warga negaranya mempunyai hak yang sama termasuk dalam hak politik yang seharusnya memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Para pemimpin politik harus bertindak dengan integritas dan transparansi, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik harus diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam pemilu dan diskusi publik yang demokratis. Keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan politiknya bergantung pada keberpihakan para pemimpin dan masyarakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama (Triantini, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur tentang partai politik di Indonesia. Memuat berbagai ketentuan dan peraturan tentang bagaimana partai politik harus dibentuk dan dikelola, serta menentukan hak dan kewajiban partai politik. Undang-Undang ini juga mengatur tentang cara partai politik berpartisipasi dalam pemilu dan memilih anggota parlemen. Juga mengatur tentang sumber dana partai politik, serta menentukan sanksi bagi partai politik yang melakukan pelanggaran hukum, dan memastikan bahwa partai politik memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, dan bahwa partai politik memiliki akses yang adil dan sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Proses politik melibatkan berbagai elemen, seperti partai politik, lembaga legislatif, media, dan masyarakat sipil. Masing-masing elemen ini memiliki peran yang berbeda dan unik, tetapi bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperbaiki kualitas hidup warga negara. Dalam sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan adil dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam sistem politik, kualitas pemimpin dan pembuat kebijakan sangat penting bagi keberhasilan proses pembuatan kebijakan. Pemimpin dan pembuat kebijakan harus memiliki integritas yang tinggi dan memperjuangkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok (Mukmin & Prayetno, 2018).

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi. Fungsi utama partai politik ialah sebagai wakil rakyat dan pemersatu suara masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Partai politik memperjuangkan program dan pandangan mereka melalui proses politik dan memastikan bahwa suara mereka terdengar oleh pembuat kebijakan. Partai politik juga berperan dalam membantu masyarakat memilih pemimpin dan pembuat kebijakan yang sesuai dengan pandangan dan aspirasi mereka. Dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peran penting dalam proses pemilu dengan mempresentasikan calon pemimpin dan memperjuangkan program mereka kepada masyarakat.(Triantini, 2019).

Pendidikan politik termasuk dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang harus diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memahami dan menghormati sistem dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik juga memfokuskan pada pembentukan karakter dan sikap demokratis serta membantu siswa memahami peran dan fungsi partai politik dalam demokrasi ini sejalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang pendidikan politik di Indonesia.

Pendidikan politik oleh partai politik di Indonesia adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh partai politik untuk membentuk anggotanya dan masyarakat menjadi warga negara yang informasi dan memahami sistem politik dan hak dan kewajibannya. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang memahami dan peduli dengan isu-isu politik dan memahami pentingnya demokrasi dan partisipasi politik. Partai politik melakukan pendidikan politik melalui berbagai program dan kegiatan, seperti lokakarya, seminar, diskusi, dan pelatihan. Dalam program-program tersebut, partai politik membahas tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, toleransi, dan kerukunan (Hasyim et al., 2020).

Pemilih pemula adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan warga negara yang baru pertama kali mengikuti pemilu atau memiliki pengalaman yang sangat sedikit dalam hal pemilihan umum. Biasanya, pemilih pemula adalah generasi muda atau warga negara yang baru saja memasuki usia pemilih. Pemilih pemula memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi, karena mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi arah dan hasil pemilu. Oleh karena itu,

pendidikan politik dan pemahaman tentang sistem politik dan proses pemilu sangat penting bagi pemilih pemula (Lestari et al., 2018).

Partai politik dan pemerintah dapat membantu dalam membentuk pemahaman pemilih pemula melalui pendidikan politik yang efektif. Program-program yang ditujukan khusus untuk pemilih pemula, seperti seminar dan diskusi, dapat membantu mereka memahami sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan proses pemilu. Dengan memahami pentingnya peran pemilih pemula dalam demokrasi, maka upaya untuk membentuk pemahaman yang baik tentang politik dan demokrasi harus dilakukan agar mereka dapat berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses pemilu dan memastikan bahwa demokrasi di negara mereka berjalan dengan baik (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Dalam hal ini, salah satu partai yang menarik adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973. Partai ini merupakan salah satu dari sedikit partai politik lama yang masih aktif dan berpengaruh di Indonesia. Secara umum, PDI Perjuangan dianggap sebagai partai moderat yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme serta memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai ini sangat penting bagi perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia dan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan pandangan masyarakat tentang isu-isu politik dan pembangunan nasional (Permana & Adi, 2015).

PDI Perjuangan Kota Mataram saat ini terus berupaya untuk siap menghadapi ajang Pemilu 2024. Setelah selesai melakukan tahapan Sipol yang diterima instruksi dari DPP dan DPD PDI Perjuangan NTB untuk pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, sekarang DPC PDI Perjuangan Kota Mataram fokus memperkuat diri untuk memahami lebih dalam hal-hal teknis terkait Pemilu. Pernyataan dari mereka, bahwa persiapan yang baik akan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan memenangkan Pemilu 2024. Terlebih lagi, DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB menetapkan target bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Mataram dapat meraih delapan kursi di Pemilu 2024 (SuaraNTB, [suarantb.com](http://suarantb.com) diakses pada tanggal 08/02/2023 pukul 17.12 WITA).

Oleh karena itu, penting bagi calon pemilih pemula untuk mengembangkan pendidikan politiknya, sehingga sangat menarik untuk mengetahui sistem pengenalan pendidikan politik dari PDI Perjuangan dalam memahami hal-hal teknis tentang pemilu. Mengetahui sejauh mana kemampuan teknis tentang pemilu untuk dikuasai dengan baik, seperti mengawasi suara. Kampanye yang hebat akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kemampuan untuk memahami hal-hal teknis. Secara keseluruhan, PDI Perjuangan cabang Kota Mataram menganggap pendidikan politik sebagai bagian penting dari upayanya untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik (SuaraNTB, [suarantb.com](http://suarantb.com) diakses pada tanggal 08/02/2023 pukul 17.12 WITA).

Berusaha membantu membentuk pemahaman yang baik tentang isu-isu politik dan pembangunan nasional melalui program-program pendidikan politik

yang efektif. Namun seperti apa bentuk-bentuk pendidikan politik untuk pemilih pemula sebagai persiapan dan pengkaderan yang akan berpartisipasi dalam pemilu serentak yang akan datang menjadi menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti memilih judul “Pendidikan Politik Pemilih Pemula Oleh Partai Politik (Studi Kasus Partai Politik PDI Perjuangan Cabang Kota Mataram)”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi latarbelakang masalah diatas, maka dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendidikan politik oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram untuk pemilih pemula?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pendidikan politik oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram untuk pemilih pemula?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat dilihat dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendidikan politik oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram untuk pemilih pemula.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram untuk pemilih pemula.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu kegunaan secara teoritis, kegunaan secara akademik dan kegunaan secara praktis. Adapun uraian masing-masing kegunaan penelitian tersebut di atas yaitu:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

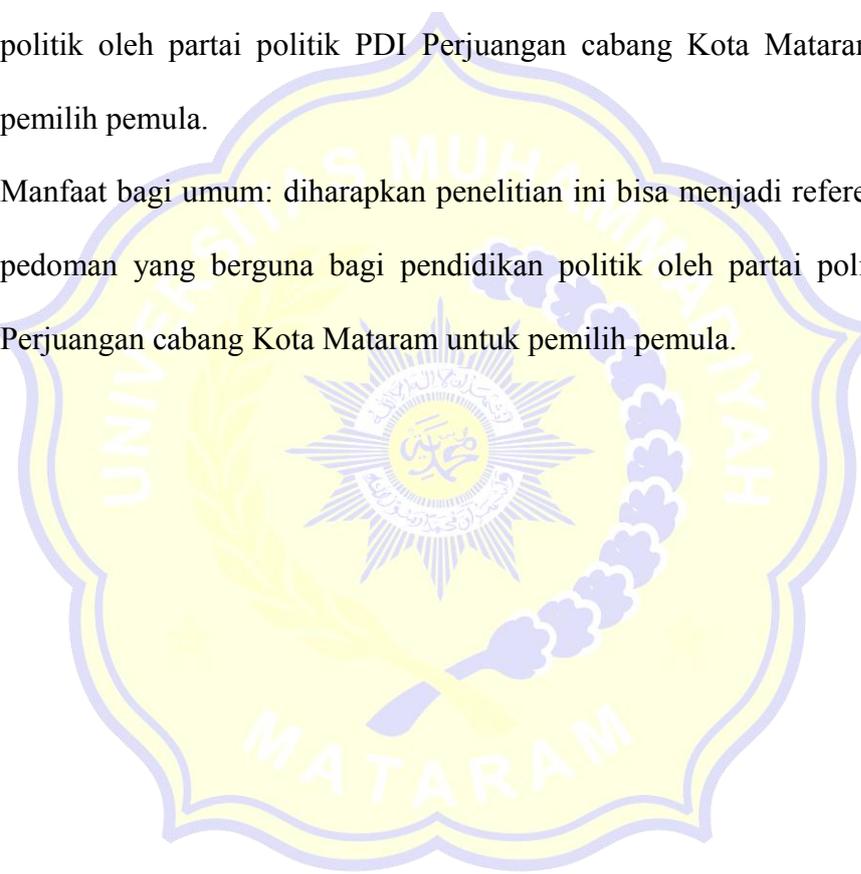
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan memberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap jurusan ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan dibangku perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pendidikan politik oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram untuk pemilih pemula dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepada daerah.

### **1.4.2 Secara Akademik**

1. Hasil penelitian ini harus memenuhi salah satu syarat untuk penelitian (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perguruan tinggi sebagai lembaga sosialisasi peraturan Pemerintah.
2. Sebagai literatur untuk penelitian ini selanjutnya mengenai pendidikan politik oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram untuk pemilih pemula.

### 1.4.3 Secara Praktis

- a) Manfaat bagi peneliti: mampu mengetahui secara lebih rinci mengenai tanggung jawab penanganan dan pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).
- b) Manfaat bagi pembaca: pembaca dapat mengetahui apa bentuk pendidikan politik oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram untuk pemilih pemula.
- c) Manfaat bagi umum: diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi atau pedoman yang berguna bagi pendidikan politik oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram untuk pemilih pemula.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebagai salah satu sumber acuan, penelitian sebelumnya sangat membantu penulis dalam memperkaya teori saat melakukan penelitian ini. Setelah melakukan pencarian, penulis tidak menemukan adanya penelitian dengan judul yang identik. Namun, beberapa penelitian lain tetap diambil sebagai bahan untuk menambah kualitas penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah daftar beberapa skripsi, tesis, dan ulasan yang menjadi rujukan dalam proses penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Penelitian sebelumnya memiliki beberapa persamaan dengan judul ini, termasuk penggunaan jenis penelitian kualitatif dan analisis data yang berbeda serta sudut pandang yang sama tentang politik. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, teori yang digunakan, dan metode penilaian. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di DPC PDI Perjuangan Kota Mataram.

1. Penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh (Kusuma, 2019) mengangkat judul: “Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019. Adapun hasil penelitian ini yaitu:
  - a. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu

2019 dengan melakukan sosialisasi politik, pemenuhan hak politik dan menciptakan pemilu yang aksesibilitas.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi KPU Lombok Timur dalam melakukan Pendidikan politik, terdapat dua faktor yaitu faktor individu dan faktor lingkungan yang dimana kurangnya wawasan politik dan juga sikap apatis 102 dan sinisme politik para pemilih disabilitas, dan juga faktor lingkungan seperti money politik dan kampanye hitam, hal ini yang mempengaruhi KPU Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pendidikan politik.

2. Penelitian selanjutnya dari skripsi (Irawan, 2019) dengan judul: “Peran Pendidikan Politik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dalam Pilgub NTB Tahun 2018 (Studi Kasus DPD IMM)”. Membahas tentang peran dari IMM dalam pendidikan politik di Pilgub NTB tahun 2018. Hasilnya sebagai berikut:

a. Organisasi mahasiswa IMM memiliki peran besar dalam membentuk budaya politik Pancasila pada mahasiswa melalui diskusi, demokrasi, sosialisasi, dan partisipasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah dan gubernur.

b. IMM menyediakan pendidikan politik bagi mahasiswa, dengan bentuk partisipasi politik paling umum seperti pemungutan suara dan diskusi-diskusi politik.

c. Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang muncul, seperti rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa dan apatisme mereka, serta kurangnya instruktur yang diberikan oleh IMM, yang baru berdiri

beberapa tahun. Hal ini menjadi kendala dalam upaya penyelenggaraan pendidikan politik oleh IMM.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh (Sandika, 2018) yang berjudul: “Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017”. Membahas tentang peran partai PDI Perjuangan dalam pendidikan politik di Pilkada Mesuji tahun 2017, menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Strategi pendidikan politik PDI Perjuangan dengan menerapkan pola monitoring evaluasi dan agitasi, advikasi serta propokasi melalui strategi tersebut partai dapat dengan mudah masuk ke kehidupan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat terhadap politik meningkat.
- b. Bentuk pendidikan politik PDI Perjuangan antara lain latihan kepemimpinan, dialog public, debat terbuka, kampanye dialogis, kelompok binaan atau menjalin mitra dan lain-lain yang sejenis dengan nya. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan kabupaten Mesuji sesuai dengan fungsinya selaku partai politik.

4. Penelitian selanjutnya dari (Rahman, 2018) adalah jurnal dengan judul “Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan”. Membahas tentang konsep dasar pendidikan politik dari pendidikan kewarganegaraan tahun 2018. Menghasilkan sebagai berikut:

- a. Siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum dituntut untuk melek terhadap politik, agar dapat berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. Untuk menciptakan masyarakat

yang melek politik, maka diperlukan pendidikan politik sejak dini. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah bagi pemilih pemula.

b. Telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan paper jurnal ini. Terimakasih juga kepada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana, sudah memberikan kesempatan dalam berkarya dan pengembangan diri.

5. Penelitian dari (Nurdin, 2016) berjudul “Implementasi Kewajiban Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Bone Bolango”. Membahas tentang implementasi parpol dalam melaksanakan pendidikan di kabupaten Bone Bolango. Menghasilkan sebagai berikut:

a. Sebagian besar partai politik mengaku dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD hanya diperuntukan untuk melaksanakan pendidikan politik ataupun proses pengkaderan terhadap kader partai politik, selanjutnya diperuntukan untuk pembiayaan kesekretarian partai dimana untuk pengadaan ATM/ATK. Sementara dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat sebagian besar dijalankan hanya pada saat masa kampanye dilaksanakan.

b. Model yang peneliti tawarkan akan tetap mengacu pada muatan Pasal Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Akan tetapi model ataupun cara penyaluran kegiatan pendidikan

politik kepada masyarakat perlu ada suatu mekanisme yang sama untuk dijalankan oleh seluruh partai politik, hingga pada terakhir perlu ada penguatan sanksi yang tegas untuk diberlakukan kepada partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, seperti jenis penelitian, jenis data, dan analisis data, dan membahas masalah pendidikan politik. Namun, perbedaan terletak pada fokus masalah yang dibahas, dimana peneliti saat ini memfokuskan diri pada pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh cabang PDI Perjuangan Kota Mataram, sementara penelitian sebelumnya membahas tentang strategi KPU, peran pendidikan politik, peran partai politik, dan konsep dasar pendidikan politik dalam pendidikan kewarganegaraan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Metode	Hasil	Relevansi
1	Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 (Kusuma, 2019)	Kualitatif	1. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu 2019 dengan melakukan sosialisasi politik, pemenuhan hak politik dan menciptakan pemilu yang aksesibilitas. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi KPU Lombok Timur dalam	Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pendidikan politik Pemilihan umum.

			<p>melakukan Pendidikan politik, terdapat dua faktor yaitu faktor individu dan faktor lingkungan yang dimana kurangnya wawasan politik dan juga sikap apatis 102 dan sinisme politik para pemilih disabilitas, dan juga faktor lingkungan seperti money politik dan kampanye hitam, hal ini yang mempengaruhi KPU Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pendidikan politik.</p>	
2	<p>Peran Pendidikan Politik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dalam Pilgub NTB Tahun 2018 (Studi Kasus DPD IMM) (Irawan, 2019)</p>	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi mahasiswa IMM memiliki peran besar dalam membentuk budaya politik Pancasila pada mahasiswa melalui diskusi, demokrasi, sosialisasi, dan partisipasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah dan gubernur.</li> <li>2. IMM menyediakan pendidikan politik bagi mahasiswa, dengan bentuk partisipasi politik paling umum seperti pemungutan suara dan diskusi-diskusi politik.</li> <li>3. Meskipun demikian, masih ada beberapa</li> </ol>	<p>Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pendidikan politik Pemilihan umum.</p>

			<p>hambatan yang muncul, seperti rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa dan apatisme mereka, serta kurangnya instruktur yang diberikan oleh IMM, yang baru berdiri beberapa tahun. Hal ini menjadi kendala dalam upaya penyelenggaraan pendidikan politik oleh IMM.</p>	
3	<p>Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017 (Sandika, 2018)</p>	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi pendidikan politik PDI Perjuangan dengan menerapkan pola monitoring evaluasi dan agitasi, advikasi serta propokasi melalui strategi tersebut partai dapat dengan mudah masuk ke kehidupan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat terhadap politik meningkat.</li> <li>2. Bentuk pendidikan politik PDI Perjuangan antara lain latihan kepemimpinan, dialog public, debat terbuka, kampanye dialogis, kelompok binaan atau menjalin mitra dan lain-lain yang sejenis denganya. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan kabupaten Mesuji sesuai dengan fungsinya selaku partai politik.</li> </ol>	<p>Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pendidikan politik.</p>

4	Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Rahman, 2018)	Kualitatif	<p>1. Siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum dituntut untuk melek terhadap politik, agar dapat berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. Untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, maka diperlukan pendidikan politik sejak dini. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah bagi pemilih pemula.</p> <p>2. Telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan paper jurnal ini. Terimakasih juga kepada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana, sudah memberikan kesempatan dalam berkarya dan pengembangan diri.</p>	Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama pemilih pemula.
5	Implementasi Kewajiban Partai Politik Dalam Melaksanakan	Kualitatif	<p>1. Sebagian besar partai politik mengaku dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari</p>	Kaitan antara penelitian ini dengan

	<p>Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Bone Bolango (Nurdin, 2016)</p>		<p>APBD hanya diperuntukan untuk melaksanakan pendidikan politik ataupun proses pengkaderan terhadap kader partai politik, selanjutnya diperuntukan untuk pembiayaan kesekretarian partai dimana untuk pengadaan ATM/ATK. Sementara dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat sebagian besar dijalankan hanya pada saat masa kampanye dilaksanakan.</p> <p>2. Model yang peneliti tawarkan akan tetap mengacu pada muatan Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Akan tetapi model ataupun cara penyaluran kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat perlu ada suatu mekanisme yang sama untuk dijalankan oleh</p>	<p>penelitian penulis adalah sama-sama membahas pendidikan politik pemilih pemula.</p>
--	--	--	--	--

			seluruh partai politik, hingga pada terakhir perlu ada penguatan sanksi yang tegas untuk diberlakukan kepada partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, antara lain jenis penelitian yaitu perhitungan, jenis data, dan jenis penelitian. analisis data, dan ada kesamaan masalah yang dibahas mengenai Pendidikan Politik pemilih pemula. Sedangkan perbedaan penelitian yang dicari peneliti terletak pada inti pembahasan masalah yang dibahas dimana peneliti berfokus dalam pembahasan permasalahan yang dibahas dimana peneliti membahas tentang Pendidikan politik pemuda oleh partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram. Sementara penelitian sebelumnya membahas tentang peran KPU dalam pendidikan politik, analisis pendidikan politik, peran organisasi dalam pendidikan politik, dan implemenatsi kewajiban kendidikan politik.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Definisi Demokrasi**

Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan dan otoritas kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan turut serta dalam

proses pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kebebasan sipil, serta mendorong terciptanya kesetaraan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, demokrasi menjadi sebuah sistem pemerintahan yang berperan penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan suatu negara, serta menjamin kesejahteraan rakyatnya (Pakaya & Dali, 2021).

Menurut beberapa ahli, demokrasi merupakan suatu sistem politik yang harus memenuhi beberapa kriteria, seperti perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas terhadap kebijakan publik, dan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Dalam pandangan Yascha Mounk, peneliti politik di Universitas Harvard, demokrasi harus memperhatikan dan melindungi hak minoritas serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf asal India, menekankan bahwa demokrasi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mampu menyelesaikan masalah sosial dan konflik di masyarakat (Nasution, 2013).

Sementara itu, menurut Francis Fukuyama, seorang ahli politik dan ekonomi, demokrasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan rakyat melalui pemilihan umum dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak minoritas dan mencegah terjadinya tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Fukuyama juga menekankan bahwa demokrasi harus dijalankan melalui sistem hukum yang kuat dan independen,

serta dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diakui secara universal (Adityawarman, 2020).

Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan yang memberikan hak suara kepada seluruh rakyat untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, serta mendorong terciptanya kesetaraan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negara. Setiap suara dalam demokrasi dianggap memiliki nilai yang sama, dan kepentingan masyarakat diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu (Raha, 2019).

### **2.2.2 Definisi Politik**

Politik dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan pembagian sumber daya yang berhubungan dengan kepentingan publik atau masyarakat. Hal ini melibatkan proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Politik juga terkait dengan sistem pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah. Secara umum, politik melibatkan interaksi antara individu dan kelompok yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama, termasuk pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya, penyelesaian konflik, dan penerapan kebijakan publik (Nasution, 2013).

Definisi teori politik merujuk pada kumpulan gagasan dan pandangan yang dipakai untuk memperoleh pemahaman dan penjelasan terhadap fenomena politik dalam suatu sistem politik. Teori politik meliputi berbagai aspek, termasuk

pandangan tentang kekuasaan, tata pemerintahan, kebijakan publik, dan partisipasi politik. Definisi teori politik terus berkembang dan berubah sejalan dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Teori politik sangat penting untuk membantu masyarakat memahami dinamika politik yang terjadi di dalam negeri maupun di tingkat internasional, serta dapat memberikan arahan bagi pengambilan keputusan politik yang lebih baik (Triantini, 2019).

Dalam lingkungan akademik, politik adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada studi tentang berbagai topik seperti hubungan kekuasaan, kebijakan publik, organisasi politik, pemilihan umum, partisipasi politik, dan teori politik. Ahli politik bertujuan untuk memahami peran serta fungsi politik dalam masyarakat, dan mengembangkan konsep dan teori yang dapat membantu dalam menjelaskan fenomena politik yang ada di dunia. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik dan terlibat secara aktif dalam kegiatan politik dapat membantu individu dan masyarakat mempengaruhi pembentukan kebijakan publik serta masa depan masyarakat yang lebih baik (Aji & Indrawan, 2020).

#### **2.2.2.1 Teori Partisipasi Publik**

Teori politik memiliki sebuah pandangan yaitu Teori Partisipasi Publik. Teori ini memfokuskan pada peran masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Konsep partisipasi publik dianggap sebagai suatu bentuk pengawasan dan kontrol sosial terhadap tindakan pemimpin politik, sehingga dapat mendorong pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Para ahli seperti Archon Fung

dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2016 berjudul "Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy" dan Stefano Moroni dalam bukunya yang berjudul "Education for Democratic Citizenship: A Lifelong Learning Perspective" pada tahun 2017, telah membahas lebih lanjut tentang Teori Partisipasi Publik dan aplikasinya dalam berbagai bidang (Ruhana, 2020).

Teori politik mengemukakan bahwa Teori Partisipasi Publik menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik sebagai cara untuk mengawasi dan mengontrol tindakan para pemimpin politik. Partisipasi publik dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik, memperkuat legitimasi pemerintah dan lembaga publik, serta mengatasi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga publik. Selain itu, partisipasi publik juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan responsif terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik (Rining Nawangsari et al., 2021).

Teori Partisipasi Publik telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti urbanisasi, lingkungan, dan pendidikan politik. Hal ini dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota dan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Di bidang lingkungan, Teori Partisipasi Publik diterapkan dalam proses pengambilan keputusan tentang isu-isu lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur dan pengelolaan limbah. Partisipasi publik dapat membantu masyarakat memahami dampak kebijakan lingkungan dan memperkuat dukungan serta kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil (Puspika Sari et al., 2020).

### **2.2.2.2 Prinsip-Prinsip Partisipasi Publik**

Ada beberapa prinsip dasar dalam Teori Partisipasi Publik yang dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Beberapa prinsip tersebut antara lain (Puspika Sari et al., 2020):

1. Keterbukaan dan transparansi: Prinsip ini mengharuskan pemerintah dan lembaga publik untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi dan proses politik kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Inklusivitas: Prinsip ini menuntut partisipasi semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, terutama kelompok-kelompok yang sering diabaikan dalam proses politik. Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat.
3. Responsivitas: Prinsip ini mengharuskan pemerintah dan lembaga publik untuk merespons secara aktif dan terbuka terhadap masukan dan pendapat masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan memiliki peran yang lebih penting dalam proses politik.
4. Akuntabilitas: Prinsip ini menuntut pemerintah dan lembaga publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif.

### 2.2.3 Pemilihan Umum

Pemilihan umum merujuk pada sekumpulan konsep dan hipotesis yang membahas perilaku pemilih ketika melakukan pemilihan umum. Teori ini bertujuan untuk memahami mengapa pemilih memilih calon tertentu dan faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan mereka. Salah satu teori pemilihan umum yang terkenal adalah model pilihan rasional atau rational choice model. Model ini mengasumsikan bahwa pemilih adalah individu yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Pemilih akan memilih kandidat yang paling sesuai dengan kepentingan mereka, seperti kebijakan ekonomi, lingkungan, atau isu-isu sosial yang mereka pedulikan (Paendong, 2021).

Sistem pemilihan umum di Indonesia dilakukan dengan cara pemilihan langsung, di mana pemilih secara langsung memilih calon tanpa perantara. Setelah pemilihan umum selesai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perhitungan suara dan penetapan pemenang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah suara yang diperoleh, kriteria kemenangan, dan faktor-faktor lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Melalui mekanisme ini, pemilihan umum di Indonesia diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Selain itu, pemilihan umum juga dianggap sebagai sarana penting untuk meningkatkan representasi politik dan akuntabilitas pemerintahan (Subiyanto, 2020).

#### **2.2.4 Konsep Pendidikan Politik**

Konsep pendidikan politik merujuk pada upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Pendekatan utama dari pendidikan politik adalah untuk meningkatkan kesadaran politik, memperkuat partisipasi, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Topik-topik yang dibahas dalam pendidikan politik meliputi hal-hal seperti sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, proses pemilihan umum, hak asasi manusia, kebijakan publik, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang terkait dengan politik (Hasyim et al., 2020).

Dalam garis besar, pendidikan politik dapat dijelaskan sebagai suatu usaha untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan tentang sistem politik, proses politik, dan isu-isu politik kepada masyarakat agar mereka menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik juga bertujuan untuk membantu masyarakat memahami betapa pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana cara untuk memengaruhi pembentukan kebijakan publik dan mengatasi berbagai masalah sosial dan politik yang ada (Saputro, 2021).

Pendidikan politik dapat dipahami sebagai sebuah proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang sistem politik dan partisipasi dalam aktivitas politik. Konsep ini mengasumsikan bahwa pendidikan politik tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman individu tentang konsep-konsep politik, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan sosial dan kognitif yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Pendidikan politik melibatkan berbagai aspek seperti pembentukan identitas politik, pengembangan sikap kritis terhadap isu-isu politik, dan pembelajaran tentang berbagai bentuk partisipasi politik (Arniti, 2020).

Pendidikan politik juga memiliki tujuan lain yang terkait dengan pembentukan keterampilan dan sikap individu yang berkaitan dengan partisipasi politik. Konsep ini mengasumsikan bahwa pendidikan politik dapat membantu individu memahami kepentingan dan hak-hak mereka dalam sistem politik yang demokratis, serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam aktivitas politik. Selain itu, pendidikan politik juga diharapkan dapat membantu individu untuk memahami dan menghargai keragaman budaya dan pandangan politik dalam masyarakat, serta mengembangkan keterampilan untuk berdialog dan bekerja sama dengan individu dari latar belakang yang berbeda dalam konteks politik (Tamma, 2021).

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang kuat dan stabil. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang sistem politik dan tata cara pemilihan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan umum, dan mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, pendidikan politik dapat membantu membangun masyarakat yang lebih demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab (Prasetyo, 2021).

Pendidikan politik adalah proses pembentukan dan pengorganisasian kesadaran politik individu untuk dapat memahami, memilih, dan bertindak dalam masalah-masalah politik. Dikemukakan bahwa pendidikan politik dapat dilakukan

dalam dua aspek, yaitu pendidikan politik formal di lembaga pendidikan dan pendidikan politik informal melalui pengalaman sehari-hari. Menekankan pentingnya pendidikan politik dalam memperkuat partisipasi politik dan membangun warga negara yang aktif dan kritis. Para pemimpin politik dan elit harus memahami pentingnya pendidikan politik dalam membentuk sikap dan pandangan politik yang berkualitas untuk memimpin masyarakat. Menurut Easton dalam (Mulyadi & Anyan, 2019).

#### **2.2.4.1 Prinsip-Prinsip Pendidikan Politik**

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai politik yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip pendidikan politik mencakup hal-hal berikut (Mulyadi & Anyan, 2019):

1. Partisipasi Demokratis: Pendidikan politik harus mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Ini meliputi pemilihan, membentuk opini publik, dan mengambil tindakan politik.
2. Kesadaran Politik: Pendidikan politik harus mendorong kesadaran politik yang kuat dan pemahaman tentang bagaimana sistem politik bekerja. Warga negara harus memahami hak dan tanggung jawab mereka serta hak-hak dan tanggung jawab orang lain.
3. Keterampilan Kritis: Pendidikan politik harus membantu warga negara untuk mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi politik. Ini meliputi

keterampilan dalam mengidentifikasi sumber informasi yang andal dan mengevaluasi argumen politik yang kompleks.

4. Pendidikan Pluralisme: Pendidikan politik harus mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman dan pluralitas pandangan politik. Ini meliputi memahami pandangan yang berbeda dan belajar bagaimana memimpin dan berpartisipasi dalam diskusi dan debat politik yang sehat.
5. Etika Politik: Pendidikan politik harus mendorong pengembangan etika politik dan tanggung jawab. Warga negara harus memahami prinsip-prinsip moral dan etika yang terkait dengan tindakan politik dan harus berpartisipasi dalam politik dengan integritas dan kejujuran.
6. Kompetensi Sosial: Pendidikan politik harus mendorong pengembangan kompetensi sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik yang kompleks. Ini meliputi keterampilan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan sosial yang sehat dan produktif.

#### **2.2.4.2 Aspek-Aspek Pendidikan Politik**

Harold Lasswell mengembangkan teori pendidikan politik dalam bukunya yang berjudul "Politics: Who Gets What, When, How". Menurut Lasswell, pendidikan politik harus mencakup tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep politik dalam kehidupan sehari-hari. Pada level pemikiran tingkat rendah, pendidikan politik dapat membantu memahami dan mengingat fakta-fakta dan informasi dasar tentang politik, seperti konsep-konsep dasar tentang negara, demokrasi, dan

partisipasi politik. Di level yang lebih tinggi, pendidikan politik dapat membantu dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep politik secara kritis dan kreatif, serta mengembangkan keterampilan analisis, evaluasi, dan sintesis dalam konteks politik (Sandika, 2018).

Menurut Lasswell dalam (Nurdin, 2016), pendidikan politik juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendidikan politik bukan hanya membantu individu memahami politik secara teoritis, tetapi juga membentuk karakter moral dan etis dalam berpolitik. Dengan memiliki karakter yang baik, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik dan membantu memperbaiki sistem politik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Lasswell menekankan pentingnya pendidikan politik dalam pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkembang secara berkelanjutan dijelaskan dalam tiga aspek pendidikan politik:

### **1. Pengetahuan politik**

Aspek pertama dari pendidikan politik adalah memberikan pengetahuan politik dasar kepada masyarakat. Ini meliputi pemahaman tentang sistem politik, proses pemilihan, peran dan fungsi lembaga-lembaga politik, dan hak serta tanggung jawab warga negara. Pengetahuan politik ini penting bagi warga negara untuk memahami dinamika politik dan mengambil keputusan politik yang lebih baik.

## **2. Keterampilan politik**

Aspek kedua dari pendidikan politik adalah mengembangkan keterampilan politik yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Keterampilan politik termasuk kemampuan untuk berdebat, bekerja sama, memimpin, dan mempengaruhi orang lain. Keterampilan ini penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan, kampanye politik, dan kegiatan politik lainnya.

## **3. Sikap politik**

Aspek ketiga dari pendidikan politik adalah pengembangan sikap politik yang positif. Ini meliputi sikap seperti kepedulian terhadap masalah politik, toleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan keterlibatan aktif dalam proses politik. Sikap politik yang positif adalah penting bagi warga negara untuk mengambil tindakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan politik di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam konteks pendidikan politik, Dalam ketiga aspek ini saling terkait dan harus ditekankan dalam pendidikan politik. Pendidikan politik yang baik harus memberikan pengetahuan yang memadai, mempromosikan sikap yang positif terhadap politik, dan mengembangkan keterampilan politik yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Apabila dihubungkan dengan pendidikan politik pemilih pemula oleh partai politik adalah kemampuan partai politik PDI Perjuangan cabang Kota Mataram dalam menjalankan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

### 2.2.4.3 Manfaat Pendidikan Politik

Menurut (Tamma, 2021): Pendidikan politik memiliki banyak manfaat, di antaranya:

1. Meningkatkan partisipasi politik: Pendidikan politik dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, seperti pemilihan umum, mempengaruhi opini publik, dan melakukan tindakan politik untuk memengaruhi perubahan.
2. Memperkuat demokrasi: Pendidikan politik membantu memperkuat demokrasi dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga negara yang diperlukan untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses politik.
3. Meningkatkan kesadaran politik: Pendidikan politik membantu meningkatkan kesadaran politik warga negara dan pemahaman tentang bagaimana sistem politik bekerja. Ini memungkinkan warga negara untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka serta hak dan tanggung jawab orang lain dalam konteks politik.
4. Mendorong pengembangan etika politik dan tanggung jawab: Pendidikan politik membantu mengembangkan etika politik dan tanggung jawab warga negara. Warga negara harus memahami prinsip-prinsip moral dan etika yang terkait dengan tindakan politik dan harus berpartisipasi dalam politik dengan integritas dan kejujuran.
5. Meningkatkan keterampilan kritis: Pendidikan politik membantu meningkatkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk menganalisis dan

mengevaluasi informasi politik. Ini meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi sumber informasi yang andal dan mengevaluasi argumen politik yang kompleks.

6. Mendorong perspektif global: Pendidikan politik dapat membantu mengembangkan perspektif global dan mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman dan perbedaan budaya dan pandangan politik.

Manfaat-manfaat ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan politik dalam membentuk warga negara yang berpartisipasi aktif dan memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Hal ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih demokratis dan berdaya saing.

#### **2.2.4.4 Faktor-Faktor Pendidikan Politik**

Pendidikan politik memiliki dampak besar pada individu dan lingkungan sosial mereka. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami dan mengikuti isu-isu yang mempengaruhi negara kita. Oleh karena itu, pendidikan politik dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan membantu membangun minat yang kuat dalam politik. Dengan memahami pentingnya pendidikan politik, kita dapat lebih peka terhadap masalah bangsa dan lebih aktif dalam konteks politik. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan Politik menurut Bloom dalam (Kusuma, 2019) sebagai berikut:

1. **Pendidikan Formal:** Pendidikan formal, seperti pendidikan dasar dan menengah, dan perguruan tinggi, adalah faktor yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan politik. Pendidikan formal dapat membantu memperkenalkan warga negara pada sistem politik dan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk partisipasi politik yang efektif.
2. **Kelompok Sosial:** Kelompok sosial, seperti keluarga, teman, dan kelompok masyarakat, dapat mempengaruhi pendidikan politik melalui nilai, keyakinan, dan sikap yang mereka ajarkan. Kelompok sosial juga dapat memberikan dukungan atau tekanan untuk partisipasi politik.
3. **Keterlibatan Politik:** Keterlibatan politik individu, seperti partisipasi dalam pemilihan umum, kampanye politik, dan aksi politik lainnya, dapat mempengaruhi pendidikan politik. Partisipasi politik dapat memberikan pengalaman praktis dan membantu warga negara untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk partisipasi politik yang lebih efektif.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pendidikan politik harus memperhitungkan faktor-faktor ini dan bekerja sama dengan lembaga, organisasi, dan kelompok masyarakat yang dapat membantu mempromosikan partisipasi politik dan pendidikan politik yang lebih baik.

### **2.2.5 Konsep Pemilih Pemula**

Pemilih pemula merujuk pada individu yang baru memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Di Indonesia, syarat minimal untuk memberikan suara adalah berusia 17 tahun dan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Pemilih pemula dianggap sebagai kelompok yang penting dalam proses pemilihan umum karena mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilihan dan dapat membentuk pandangan politik mereka di masa depan. Pemilih pemula biasanya cenderung kurang terlibat dalam politik dan memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah daripada pemilih lainnya (Lestari et al., 2018).

Untuk menarik partisipasi pemilih pemula dalam proses pemilihan umum, perlu dilakukan upaya-upaya khusus seperti kampanye pendidikan politik yang efektif dan mempertimbangkan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, partai politik dan kandidat yang bertarung dalam pemilihan umum juga dapat memperhatikan pemilih pemula dalam strategi kampanye mereka. Meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum dianggap sebagai upaya yang penting untuk memperkuat demokrasi dan memberikan suara yang efektif kepada warga negara yang memenuhi syarat (Rafinda & Nurmina, 2019).

Maksud dari konsep pemilih pemula adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang baru saja memasuki usia pemilih dan masih kurang berpengalaman dalam memilih pada pemilihan umum. Dengan demikian,

tujuan dari konsep ini adalah memberikan edukasi dan sosialisasi politik bagi pemuda agar mereka dapat memahami pentingnya memilih pada pemilihan umum dan terlibat secara aktif dalam proses politik (Astrika & Yuwanto, 2019).

### **2.2.6 Definisi Partai Politik**

Partai politik adalah sebuah kelompok organisasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan publik baik melalui pengambilan keputusan di dalam lembaga pemerintah maupun melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Partai politik memiliki pandangan atau ideologi tertentu dan berupaya untuk memenangkan dukungan dari pemilih agar dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin dan aktivis politik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan politik yang sama. Dalam partai politik, anggota dapat terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti pemilihan umum, kampanye politik, dan aksi protes (Pasaribu, 2017).

Konsep partai politik mencakup struktur organisasi partai, termasuk metode pemilihan pemimpin dan manajemen operasional sehari-hari, serta pandangan partai terhadap berbagai isu politik. Partai politik biasanya memiliki hierarki yang terstruktur, dengan tingkat keanggotaan yang berbeda dan tugas serta tanggung jawab yang berbeda. Partai politik juga dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam memperkuat dan menjaga sistem demokrasi yang stabil, dengan menyediakan opsi alternatif bagi pemilih, mendorong debat dan diskusi

tentang kebijakan publik, serta menjamin akuntabilitas pemerintah (Winarti et al., 2019).

Dalam pendidikan politik, partai politik seringkali menjadi bahan diskusi dan pembelajaran. Hal ini karena partai politik memiliki peran yang penting dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan publik, serta mempengaruhi arah dan tujuan pembangunan suatu negara. Para siswa akan mempelajari tentang sejarah, ideologi, dan program-partai politik, serta cara-cara mereka memperoleh dukungan dari rakyat. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang bagaimana partai politik berinteraksi dengan pemerintah, media, dan masyarakat, serta cara-cara mereka menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat (Adityawarman, 2020).

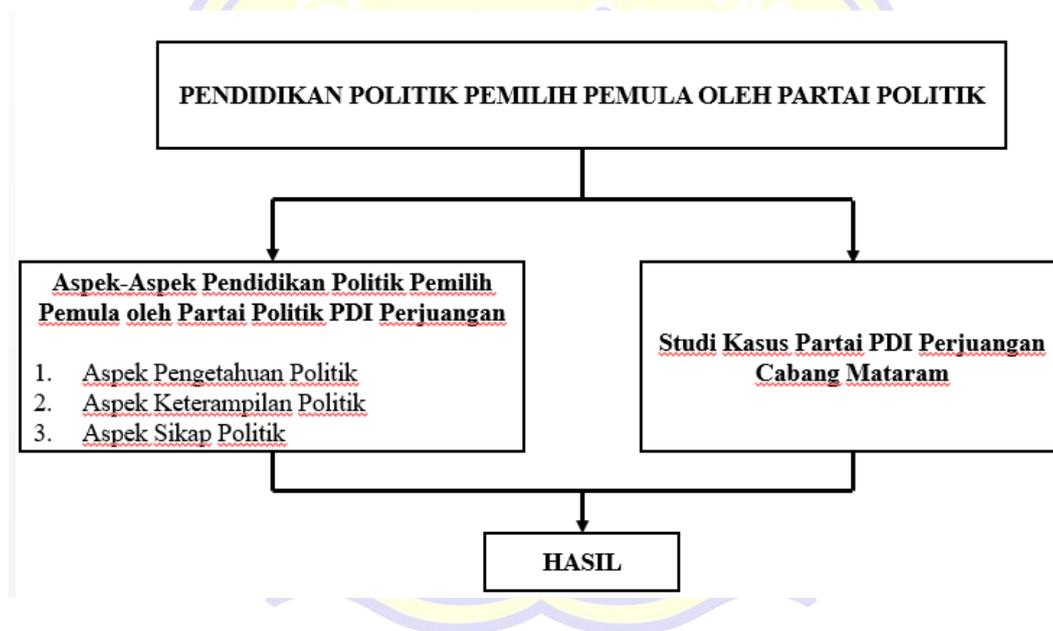
### **2.2.7 Definisi Sistem Kepartaian**

Sistem kepartaian adalah suatu bentuk organisasi politik yang terdiri dari partai politik sebagai elemen utamanya. Secara sederhana, sistem kepartaian adalah suatu mekanisme yang mengatur dan membentuk partai politik sebagai aktor politik dalam sistem demokrasi. Partai politik sendiri adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan agenda politik yang sama, dan bertujuan untuk merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam sebuah pemerintahan. Sistem kepartaian melibatkan berbagai aspek, seperti pembentukan partai, regulasi dan hukum yang mengatur partai politik, serta mekanisme pemilihan umum sebagai sarana untuk menentukan partai mana yang akan memerintah (Adityawarman, 2017).

Sistem kepartaian juga mencakup berbagai macam ideologi dan pandangan politik yang menjadi dasar bagi partai politik dalam merumuskan program dan kebijakan. Hal ini mencakup ideologi kiri, kanan, dan tengah, serta ideologi-ideologi lainnya seperti nasionalisme, agama, dan etnis. Sistem kepartaian tidak hanya terbatas pada level nasional, tetapi juga dapat ditemukan di tingkat regional atau lokal dalam daerah. Meskipun sistem kepartaian merupakan bagian integral dari sistem politik di berbagai negara (Adityawarman, 2017).

### 2.3 Kerangka Berpikir

*Bagan 2.1 Kerangka Berpikir*



### 2.4 Definisi Konseptual

Dalam penelitian, definisi konseptual digunakan sebagai panduan dalam mengatasi masalah transformasi di lapangan. Definisi ini memberikan makna yang masih abstrak, meskipun masih dapat dimengerti dengan mudah. Untuk mempermudah penafsiran teori dalam penelitian ini, peneliti akan memilih dan mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kerangka teori penelitian. Untuk

itu, beberapa definisi konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian ini akan dijabarkan dalam proposal ini antara lain:

#### **2.4.1 Politik**

Politik mencakup proses pengambilan keputusan dan pembagian sumber daya yang berhubungan dengan kepentingan publik atau masyarakat. Ini melibatkan pembuatan kebijakan, pelaksanaan keputusan, dan sistem pemerintahan. Politik mencakup interaksi antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, seperti alokasi sumber daya, penyelesaian konflik, dan penerapan kebijakan publik. Secara keseluruhan, politik mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Nasution, 2013).

Partisipasi publik memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap pemimpin politik. Ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik, memperkuat legitimasi pemerintah dan lembaga publik, serta mengatasi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, partisipasi publik juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan responsif terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik (Rining Nawangsari et al., 2021).

#### **2.4.2 Pendidikan Politik**

Pendidikan politik adalah proses pembentukan dan pengorganisasian kesadaran politik individu untuk dapat memahami, memilih, dan bertindak dalam masalah-masalah politik. Dikemukakan bahwa pendidikan politik dapat dilakukan dalam dua aspek, yaitu pendidikan politik formal di lembaga pendidikan dan pendidikan politik informal melalui pengalaman sehari-hari. Menekankan

pentingnya pendidikan politik dalam memperkuat partisipasi politik dan membangun warga negara yang aktif dan kritis (Mulyadi & Anyan, 2019).

Pendidikan politik adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan. Pendidikan politik meningkatkan kesadaran politik, memperkuat partisipasi, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Topik-topik yang dibahas dalam pendidikan politik meliputi sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, proses pemilihan umum, hak asasi manusia, kebijakan publik, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang terkait dengan politik (Hasyim et al., 2020).

#### **2.4.3 Pemilih Pemula**

Pemilih pemula adalah orang yang baru memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum dengan syarat minimal berusia 17 tahun dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Indonesia. Kelompok ini dianggap penting dalam pemilihan umum karena memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilihan dan dapat membentuk pandangan politik mereka di masa depan. Namun, pemilih pemula cenderung kurang terlibat dalam politik dan memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah (Lestari et al., 2018).

#### **2.4.4 Partai Politik**

Partai politik adalah sebuah kelompok organisasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan publik baik melalui pengambilan keputusan di dalam lembaga pemerintah maupun melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin dan aktivis politik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan politik

yang sama. Dalam partai politik, anggota dapat terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti pemilihan umum, kampanye politik, dan aksi protes (Pasaribu, 2017).

## 2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan informasi yang berguna dalam penelitian, terutama dalam mengukur variabel. Definisi ini memberikan indikasi tentang cara mengukur suatu variabel dan memberikan aktivitas yang tepat untuk dilakukan dalam penelitian. Dengan mempelajari definisi operasional, seorang peneliti dapat menemukan cara untuk mengukur variabel yang telah dipelajari. Dalam hal ini, definisi operasional memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana variabel dapat diukur dengan cara yang efektif dan konsisten sebagaimana yang tertera dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

*Tabel 2.2 Definisi Operasional*

No	Variabel	Indikator
1	Pengetahuan politik	a. Kecakapan Intelektual dalam politik b. Pemahaman sistem dalma politik
	Keterampilan Politik	a. Kampanye dalam politik b. Partisipasi dalam pemilihan
	Sikap Politik	a. Kepedulian terhadap politik b. Keterlibatan aktif dalam politik
2	Pendidikan Formal	a. Penyampaian pengetahuan politik b. Perkenalan sistem politik
	Kelompok Sosial	a. Dukungan atau tekanan b. Nilai dan Keyakinan
	Keterlibatan Politik	a. Partisipasi Politik b. Pengalaman Praktis

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Metode Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2018) Metode penelitian deskriptif kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mempelajari fenomena alami (berbeda dengan eksperimen). Dalam penelitian ini, peneliti adalah alat utama, dan data dikumpulkan melalui triangulasi teknik. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif/kualitatif, dan hasilnya lebih fokus pada makna generalisasi. Secara keseluruhan, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui deskripsi dalam kalimat dan bahasa menggunakan metode natural, dengan fokus pada menggambarkan kondisi alamiah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yaitu tentang Pendidikan Politik Pemilih pemula oleh Partai politik (studi kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Kota Mataram).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Kota Mataram, dan untuk menentukan sampel penelitian, metode *purposive sampling* digunakan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan tujuan penelitian, karena penulis percaya bahwa lokasi ini akan memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang topik penelitian. Memilih lokasi yang tepat sangat penting karena dapat mempermudah dan memfokuskan pengambilan sampel penelitian. Oleh karena itu, dipilih metode

*purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif atau non-generalisasi. *Purposive sampling* cocok digunakan pada populasi yang besar, tetapi lebih efektif jika ukuran sampelnya kecil, spesifik, dan populasi yang homogen (Sugiyono, 2016:85).

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah setelah mendapatkan surat persetujuan dan akan dilaksanakan pada bulan Maret-Mei tahun 2023.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Menurut (Sarli et al., 2021) Penting untuk menetapkan ruang lingkup penelitian ini agar menjadi panduan bagi peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi studi kualitatif berdasarkan pentingnya masalah yang akan dipecahkan, sehingga peneliti dapat mengumpulkan dan mengungkapkan data yang relevan dengan topik yang dipilih. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada observasi dan investigasi terkait, sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis yaitu Pendidikan Politik Pemilih pemula oleh Partai politik (studi kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Kota Mataram).

#### **3.3.1 Narasumber dan Informan Penelitian**

Dalam pencarian informasi, informan menjadi sumber penting untuk memberikan wawasan tentang situasi dan konteks pencarian. Informan merupakan seseorang yang benar-benar memahami masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, informan digunakan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data dan wawasan yang akurat dan relevan. Narasumber tersebut

mengatakan bahwa dirinya merupakan individu yang potensial untuk menjadi subyek penelitian dan mencakup topik yang sedang disurvei (Patilima, 2013).

Dalam survey ini, informasi dari narasumber atau informan yang merupakan Pemilih Pemula Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Kota Mataram menjadi kunci penting untuk menggali wawasan tentang topik penelitian yaitu:

1. Ketua Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan cabang Kota Mataram.
2. Anggota Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan cabang Kota Mataram.
3. Pemilih Pemula Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan cabang Kota Mataram yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, sumber utama data adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan biasanya berupa dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Studi pustaka mencakup membaca dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, artikel internet, dan materi terkait lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (Moelong., 2015):

#### **3.4.1 Wawancara atau Interview**

Dalam penelitian ini, wawancara diartikan sebagai sebuah dialog dengan tujuan tertentu. Dialog tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas terkait isu-isu terkait dengan rekomendasi dan strategi pertumbuhan, serta untuk

mengetahui jumlah total pemilih pemula dalam pemilihan presiden. Wawancara ini melibatkan kedua belah pihak yang memiliki peran berbeda. Sebagai pihak yang bertindak sebagai penemu informasi, penulis juga berperan sebagai penyidik atau pewawancara. Metode wawancara didasarkan pada rencana sebelumnya yang telah disiapkan. Untuk memudahkan pertukaran informasi antara peneliti dan narasumber, peneliti biasanya membawa alat perekam seperti perekam suara, kamera, dan alat penyimpanan data lainnya (Moleong, 2017).

### **3.4.2 Observasi**

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan semua indera untuk memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu. Teknik ini digunakan dengan cara mengamati secara langsung segala hal yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Kota Mataram dengan memperhatikan kegiatan promosi dan aktivitas lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian (Gunawan, 2013).

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dalam penelitian kualitatif, metode dokumentasi menggunakan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian, seperti catatan, buku, peraturan politik, gambar, dan cerita-cerita lainnya. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dengan cara mengutip yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka juga dilakukan untuk memperkuat penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat program

atau kegiatan dari suatu kebijakan atau metode yang diimplementasikan (Sugiyono, 2013).

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.5.1 Jenis Data**

Menurut (Moelong., 2015:4) Survei ini menggunakan jenis data kualitatif yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terkait dengan pengalaman subjek, seperti perilaku, kognisi, dan motivasi perilaku, serta interpretasinya dalam bahasa verbal dan dalam konteks tertentu. Penelitian ini mengadopsi pendekatan alami dan metode yang berbeda dari penelitian kuantitatif. Setelah diinterpretasikan, diperoleh kesimpulan bahwa data yang dihasilkan dari survei ini berupa data kualitatif, yang mencakup kata-kata, frasa, dan penjelasan, dan tidak memerlukan perhitungan numerik atau analisis statistik yang kompleks.

#### **3.5.2 Sumber Data**

Menurut (Moelong., 2011:114), Data merupakan serangkaian fakta atau peristiwa mentah yang belum diproses dan terkadang sulit diterima oleh penerima data, sehingga memerlukan pengolahan agar dapat dijadikan informasi. Data dapat berbentuk angka, kata, karakter, suara, atau simbol yang dapat dijadikan informasi. Sumber data penelitian adalah sumber yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Pentingnya sumber data dalam penelitian ilmiah adalah untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat diverifikasi. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

### **3.5.2.1 Sumber Data Primer**

Menurut (Sugiyono, 2012). Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara, dan merupakan data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu dokumen, observasi, dan wawancara langsung dengan informan di lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dengan partisipan penelitian, yaitu ketua partai PDI Perjuangan cabang Kota Mataram, anggota partai PDI Perjuangan cabang Kota Mataram, serta beberapa pemilih pemula partai PDI Perjuangan cabang Kota Mataram yang relevan dengan topik penelitian. Meskipun peneliti tidak dapat mewawancarai seluruh masyarakat karena keterbatasan waktu, namun strategi wawancara yang digunakan telah memberikan gambaran yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **3.5.2.2 Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang diambil dari sumber lain, seperti dokumen resmi, jurnal, survei, dan lainnya. Data ini dapat digunakan untuk mendukung temuan penelitian atau untuk memberikan informasi tambahan dari perspektif yang berbeda. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen yang diperoleh langsung atau melalui perantara pihak lain. Penggunaan data sekunder dapat melengkapi dan memperkuat data yang telah dikumpulkan melalui metode penelitian lain, seperti wawancara dan pengamatan. Data sekunder juga dapat

berupa informasi tertulis dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiono, 2012).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam bukunya (Sugiyono, 2013:246). Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi), dan pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden dan kemudian memformat ulang data tersebut secara terus-menerus hingga mencapai batas waktu tertentu.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga langkah penting dalam analisis data :

- 1. Reduksi data**, yang berfokus pada penyederhanaan dan transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih terkelola dan dapat diolah.
- 2. Penyajian data**, yang melibatkan pengumpulan informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif, diagram jaringan, tabel, dan diagram untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Dalam penyajian data, informasi yang terkumpul ditampilkan sebagai data atau teks yang mudah dipahami oleh pembaca.
- 3. Menarik kesimpulan**, yang melibatkan konfirmasi hasil reduksi data dan mengaitkannya dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Dalam tahap ini, data yang terkumpul dianalisis, dibandingkan satu sama lain, dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2013).

Peneliti terus berupaya untuk mencapai kesimpulan dalam bidang ini sejak awal pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dengan memperhatikan keteraturan anotasi teoretis, penjelasan, konfigurasi potensial, hubungan sebab-akibat, dan model yang relevan. Namun, kesimpulan yang dihasilkan tetap bersifat kasar, tetap mengadopsi pandangan yang liberal dan skeptis.

